

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan membandingkan jumlah SPT Tahunan PPh yang disampaikan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Berdasarkan penelitian ini ternyata tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan. Dengan hasil ini maka modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung.
2. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, dan tidak terdapat perbedaan penerimaan PPh sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung Cicadas dan KPP Pratama Bandung Karees. Maka modernisasi administrasi perpajakan hanya berpengaruh terhadap penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Bojonagara .
3. Koefisien korelasi yang diperoleh menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang sangat cukup dan searah antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan PPh pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, terdapat hubungan yang sangat lemah dan searah pada KPP Pratama Bandung

Cicadas, dan terdapat hubungan yang cukup dan berlawanan arah pada KPP Pratama Bandung Karees. Hubungan searah tersebut berarti bahwa ketika tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi maka penerimaan PPh tinggi pula, dan sebaliknya. Hubungan berlawanan arah berarti bahwa ketika tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi maka penerimaan PPh menurun, dan sebaliknya

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan dari penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis bermaksud mengajukan saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Saran yang dapat penulis sampaikan agar Direktorat Jenderal Pajak lebih mengoptimalkan program modernisasi administrasi perpajakan , khususnya membenahi administrasi Wajib Pajak terdaftar yang telah dialihkan kepada KPP lainnya sehingga Wajib Pajak tidak terdaftar dalam dua kantor pajak.

### 2. Bagi Wajib Pajak

Bagi Wajib Pajak hendaknya lebih menggali informasi mengenai informasi perpajakan khususnya kewajiban pajak masing-masing dari Wajib Pajak, sebagai bentuk tanggapan dari modernisasi yang telah dilakukan dalam perpajakan, sehingga terjalin komunikasi dua arah baik dari Wajib Pajak dan dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu perlu

dirubahnya paradigma mengenai perpajakan yang sekarang telah mengalami kemajuan dan dengan pelayanan yang lebih baik.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai masalah ini, penulis menyarankan untuk menambah jumlah objek Wajib Pajak dan tahun yang digunakan, serta menggunakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan indikator berbeda, misalkan kepatuhan dari segi pembayaran pajak terutang. Selain itu penulis menyarankan untuk melibatkan Wajib Pajak dalam penelitian selanjutnya.

